

ABSTRAK

Valentinus Bey, 21.75.7182. **Membaca Partisipasi Politik Masyarakat Indonesia dari Perspektif Teori Demokrasi Deliberatif Menurut Jürgen Habermas.** Skripsi. Program Sarjana, Program Studi Ilmu Filsafat, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, 2025.

Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk: (1) menjelaskan pemikiran Jürgen Habermas mengenai teori demokrasi deliberatif, (2) mendeskripsikan fenomena partisipasi politik masyarakat Indonesia, (3) membaca partisipasi politik masyarakat Indonesia dari perspektif demokrasi deliberatif Jürgen Habermas.

Metode yang digunakan dalam penggerjaan karya ilmiah ini adalah metode deskriptif kualitatif. Dalam hal ini penulis membuat kajian pustaka terhadap literatur-literatur yang mengulas mengenai teori demokrasi deliberatif Jürgen Habermas. Selain itu penulis juga menelusuri literatur-literatur yang mendeskripsikan dan mendiskursuskan partisipasi politik masyarakat Indonesia pasca-reformasi.

Menurut Habermas, demokrasi harus dipahami dan dipraktekkan sebagai suatu proses deliberasi. Hukum maupun kebijakan publik dihasilkan melalui proses deliberasi antara masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian, masyarakat menjadi subjek sekaligus objek dari setiap kebijakan publik yang dihasilkan. Karena itu demokrasi deliberatif sangat menekankan partisipasi politik masyarakat. Partisipasi politik menurut demokrasi deliberatif harus berlangsung secara komunikatif, argumentatif dan juga harus berlangsung di ruang publik. Hal tersebut sangat penting untuk diwujudkan, agar kebijakan yang dihasilkan sungguh-sungguh mencerminkan kepentingan masyarakat umum. Dalam konteks negara Indonesia, partisipasi politik masyarakat belum sepenuhnya terwujud sebagai demokrasi deliberatif. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa kendala seperti pemerintah yang eksklusif, deliberasi masyarakat yang sering didasari pada sentimen identitas dan ruang publik yang terkooptasi. Bagi Habermas kendala-kendala dalam proses deliberasi harus diatasi dengan deliberasi itu sendiri. Karena itu, demi menghidupkan demokrasi deliberatif yang ideal di Indonesia, masyarakat harus melakukan proses deliberasi secara terus menerus. Selain itu agar proses deliberasi berlangsung secara argumentatif tanpa terjebak pada sentimen identitas, masyarakat Indonesia perlu dibentuk menjadi masyarakat yang kritis dan rasional. Cara yang tepat untuk mewujudkan masyarakat yang demikian adalah melalui pendidikan politik.

Kata Kunci: Demokrasi Deliberatif, Jürgen Habermas, Deliberasi, Partisipasi Politik.

ABSTRACT

Valentinus Bey, 21.75.7182. **Analyzing Political Partisipation of Indonesian Society grounded in the Perspective of Jürgen Habermas's Theory of Deliberative Democracy.** Undergraduate Thesis.

This academic work aims to: (1) elucidate Jürgen Habermas's conceptualization of deliberative democratic theory, (2) describe the phenomenon of political participation within Indonesian society, and (3) analyze political participation in Indonesian society through the lens of Jürgen Habermas's deliberative democracy perspective.

The methodology employed in this academic work is qualitative descriptive. In this regard, the author conducts a literature review of scholarly works that analyze Jürgen Habermas's theory of deliberative democracy. Furthermore, the author examines literature that describes and discusses political participation within Indonesian society in the post-reformasi era.

According to Habermas, democracy must be understood and practiced as a process of deliberation. Law and public policy are produced through a deliberative process between the public and the government. Consequently, the public becomes both the subject and the object of every public policy produced. Therefore, deliberative democracy strongly emphasizes public political participation. Political participation, according to deliberative democracy, must occur communicatively, argumentatively, and also take place in the public sphere. This is crucial to realize so that the policies produced genuinely reflect the interests of the general public. In the context of Indonesia, public political participation has not fully materialized as deliberative democracy. This is due to several obstacles such as an exclusive government, public deliberation often based on identity sentiments, and a co-opted public sphere. For Habermas, these obstacles in the deliberation process must be overcome through deliberation itself. Therefore, to actualize an ideal deliberative democracy in Indonesia, the public must continuously engage in deliberative processes. Furthermore, to ensure that the deliberative process proceeds argumentatively without being trapped in identity sentiments, Indonesian society needs to be cultivated into a critical and rational public. The appropriate means to achieve such a society is through political education.

Keywords: Deliberative Democracy, Jürgen Habermas, Deliberation, Political Partisipation.